

INTISARI

PELINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :
Dicky Christian Putra¹ dan Ninik Darmini²

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang dirampas oleh negara terkait dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang dirampas oleh negara terkait dengan tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang dirampas oleh negara terkait dengan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pelindungan hukum secara preventif dilakukan dengan cara menambahkan klausul perjanjian mengenai penggantian objek jaminan fidusia dan Mengasuransikan objek jaminan fidusia. Adapun untuk pelindungan hukum secara represif dengan cara mengajukan gugatan kepada debitur atau dengan mengajukan surat keberatan kepada pengadilan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor. Upaya Hukum yang dapat di tempuh oleh kreditur pemegang jaminan fidusia dapat melalui tiga cara yaitu, Upaya hukum dalam hukum pidana (surat keberatan kepada pengadilan), Upaya Hukum dalam Hukum Perdata (gugatan secara perdata kepada debitur), dan Upaya Hukum dalam Hukum Perdata (gugatan Perlawanan oleh pihak ketiga).

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Upaya Hukum, Kreditur, Jaminan Fidusia, Tindak Pidana Korupsi.

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta

ABSTRACT

THE LEGAL PROTECTION CREDITOR FIDUCIARY GUARANTY HOLDER TO CONFISCATED GUARANTEE BY THE STATE RELATED TO CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION BY DEBITOR

Oleh :

Dicky Christian Putra³ dan Ninik Darmini⁴

The purpose of this research is to know and analyze the legal protection for the creditor holding a Fiduciary Guarantee to confiscated guarantee by the state related to criminal acts of corruption. This research intended to know and analyze legal remedies from creditor holding a Fiduciary Guarantee to confiscated guarantee by the state related to criminal acts of corruption.

The type of this legal research is normative juridical approach which focuses on literature study. The acquired data from literature research is then analyzed using a statutory approach, case approach, and conceptual approach.

Research results found that legal protection for creditors holding a Fiduciary Guarantee towards confiscated guarantees by the state related to criminal acts of corruption can be carried out preventively and repressively. The Preventive legal protection is carried out by adding an agreement clause regarding the replacement of the fiduciary guarantee object and insuring the fiduciary guarantee object. As for the Repressive legal protection is by filing a lawsuit against the debtor or by submitting an objection letter to the court in accordance with the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law number 31 of 1999 jo. Law number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. Legal remedies that can be taken by creditors holding fiduciary guarantees can be done through three ways, namely, legal remedies in criminal law (by filing objection letters to the court), legal remedies in civil law (civil lawsuits against debtor), and legal remedies in civil law (a third party opposition procedure/ *Deden Verzet*).

Kata Kunci : *Legal Protection, Legal Effort, Creditor, Fiduciary Guaranty, Criminal Action of Corruption*

³ Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴ Dosen Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta